



3.000 RUANG ISOTER SIAP DIAKTIFKAN

Pendatang Harus Dikontrol

YOGYA (KR) - DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk melakukan kontrol terhadap pendatang yang akan masuk ke DIY. Ini penting dilakukan, mengingat dalam sepekan terakhir kasus terkonfirmasi positif terus menunjukkan kenaikan.

Salah satunya dengan melakukan kontrol bagi pendatang. Terutama, yang masuk menggunakan kendaraan pribadi. Karena, banyak yang tidak menyertakan surat keterangan bebas Covid-19.

"Kalau naik kereta atau pesawat jelas syaratnya. Harus ada surat bebas Covid-19, seperti antigen atau PCR. Dan sebelum masuk hotel juga harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan status hijau. Artinya apa, segala persyaratan sudah dipenuhi. Seperti vaksin maupun bebas Covid-19," ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto kepada wartawan, Kamis (3/2).

Hal serupa juga berlaku ketika mau masuk ke objek wisata, maupun rumah makan. Apakah tempat duduknya

* Bersambung hal 7 kol 5

Pendatang Sambungan hal 1

diatur jaga jaraknya atau tidak. Termasuk Malioboro yang sudah tersedia barcode. Di sini peran Pemda melalui aparatnya untuk memastikan aturan itu benar-benar ditegakkan.

"Kita tidak melarang orang untuk masuk Yogyakarta. Tapi kontrol dan yang tidak kalah penting, kepastian Pemda dalam menegakkan aturan," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Suwardi mengemukakan, beberapa masyarakat sudah merasa Covid-19 itu sudah tidak ada. Hal itu dapat dilihat ketika mereka saling berinteraksi. Banyak yang tidak memakai masker. Termasuk ketika masuk ke pasar tradisional.

Sementara itu, kenaikan kasus harian Covid-19 di DIY dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian sejumlah kalangan termasuk Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menyikapi adanya kenaikan itu Sultan meminta kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam penegakan Prokes. Karena saat ini mulai ada kecenderungan masyarakat abai dalam penegakan Prokes. Adanya pengalaman kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia justru men-

jadikan masyarakat terlena terhadap penegakan Prokes.

"Meski sudah divaksin bukan berarti masyarakat bebas dari Covid-19, sehingga mereka bisa mengabaikan Prokes. Jadi dalam kondisi seperti sekarang penegakan Prokes tetap penting. Karena kebijakan apapun kalau masyarakat tidak bisa mengontrol dirinya sendiri juga alkimya yang terjadi mutasi.

Saat ini masih dalam situasi pandemi dan belum ada obat yang mematikan virusnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah menumbuhkan imun badan. Untuk itu saya minta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (3/2).

Sultan mengatakan, meski kenaikan kasus tergolong tinggi, pihaknya belum ada mempersempit mobilitas di wilayahnya. Jadi upaya penanganan pandemi Covid-19 di DIY masih mengacu aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.

(Ria/Ira/Awh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005